

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				INDIKATOR KINERJA ESS III	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR ESS IV	SUB KEGIATAN	TARGET KEUANGAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	2,91 Trilyun	2,91 Trilyun	2,91 Trilyun	2,93 Trilyun	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai komponen pelaporan pada LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	17,273,150	17,273,150	17,273,150	17,273,150
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12,031,875	12,031,875	12,031,875	12,031,875
							Persentase penyerapan Anggaran SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	6,142.250	0	6,142.250
											56.745.325	56.745.325	56.745.325	56.745.325
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat		A (88.25)		A (88.25)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase aset yang tercatat (harus 100%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumentasi Penyediaan Sarana Prasarana Persentase aset yang dikelola	Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Perumahan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	0	64.000.000	64.000.000	64.000.000
											0	111.819.200	111.819.200	111.819.200
											139.420.500	139.420.500	139.420.500	139.420.500
											216.584.373	216.584.373	216.584.373	216.584.373
											24.692.500	24.692.500	24.692.500	24.692.500

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				INDIKATOR KINERJA ESS III	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR ESS IV	SUB KEGIATAN	TARGET KEUANGAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							Persentase pemenuhan administrasi Perkantoran dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Persentase surat masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola Persentase pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik kantor Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.599.375	8.599.375	8.599.375	8.599.375
										Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	3.983.750	3.983.750	3.983.750	3.983.750
											124.500.000	124.500.000	124.500.000	124.500.000
											129.486.625	129.486.625	129.486.625	129.486.625

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				INDIKATOR KINERJA ESS III	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR ESS IV	SUB KEGIATAN	TARGET KEUANGAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.647.750	8.647.750	8.647.750	8.647.750
									Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		5.352.000	5.352.000	5.352.000	5.352.000
											8.760.250	8.760.250	8.760.250	8.760.250
							Persentase realisasi pelaksanaan kemitraan	Program pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah jenis potensi investasi daerah yang teridentifikasi berbasis lingkungan	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	30.235.500	37.409.000	37.409.000	37.409.000
							Persentase potensi investasi dipromosikan	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	Penyediaan Peta Potensi dan peluang Usaha provinsi	31.237.000	56.948.000	144.934.500	153.160.500
							Persentase Potensi Investasi Berbasis Lingkungan	Program pengembangan Iklim Penanaman Modal Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	39.158.200	54.462.300	100.575.400	229.504.100
										Evaluasi pelaksanaan pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	0	26.540.000	32.220.000	36.302.300

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				INDIKATOR KINERJA ESS III	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR ESS IV	SUB KEGIATAN	TARGET KEUANGAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							Persentase peningkatan Calon Investor Persentase Promosi yang ditindaklanjuti	Program Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi	1.Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting 2. Jumlah item media promosi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman modal kewenangan provinsi	77,411,000	66,196,000	56,424,000	24,826,000
							Nilai IKM penanganan (pelayanan) pengaduan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.Persentase Potensi Investasi Daerah yang diminati 2. Jumlah Pelaksanaan Promosi investasi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	204,793,300	142.534.000	114.756.300	76.226.000
							Nilai IKM penanganan (pelayanan) pengaduan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase Pemenuhan pelayanan investor Persentase pemenuhan Pelayanan Konsultasi	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	177.050.300	120.164.000	137.246.300	115.164.000
											13.073.800	20.073.800	29.144.950	24.993.650

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				INDIKATOR KINERJA ESS III	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR ESS IV	SUB KEGIATAN	TARGET KEUANGAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
								1.Persentase Pelayanan (dokumen permohonan) Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diproses sesuai standar pelayanan 2. Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	128.336.875	125.813.875	128.335.875	125.813.875	
						Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan Persentase Perusahaan yang Aktif dalam Investasinya Persentase Kab/Kota yang mencapai target Investasi 100% dari target yang telah ditetapkan	Program Pengendalian Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan) laporan Realisasi penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	17.410.000	52.564.000	52.081.000	29.076.000	
					Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu Persentase Kabupaten/Kota telah mengimplemntasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	6.700.000	9.740.000	54.611.500	122.972.500		
										48.527.900	36.672.000	73.832.000	187.809.000	
						Persentase Pengelolaan Sistem Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sistem Informasi yang berjalan dengan lancar dan data informasi yang update	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30.257.000	87.215.000	41.209.000	41.092.800	

Banjarbaru,

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Ir. H. Nafarin, MP
Pembina Utama Muda
NIP 19620513 198903 1 011